



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 3 (tiga)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 3 September 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : Pembahasan RKA/K/L Tahun Anggaran 2026
Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./ Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
24 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., beserta
jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dibuka pukul 11.02 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Badan POM RI tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp2.247.043.158.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.776.835.813.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**.
 - b. Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar **Rp470.207.345.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
2. Komisi IX DPR RI menyetujui pelaksanaan kegiatan uji sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan SPPG dilaksanakan oleh Badan POM RI dengan menggunakan Pagu Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026.
3. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI pada Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 agar mempertahankan alokasi anggaran sebesar **Rp371.111.630.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** yang semula dianggarkan untuk uji sampel dan pelatihan SPPG program MBG, direalokasi untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan POM RI, seperti:
 - a. Penindakan kasus obat dan makanan, termasuk tindak lanjut laporan masyarakat, analisis siber, serta intensifikasi operasi pengawasan.
 - b. Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan melalui implementasi SPBE, sertifikasi SDM pengawasan farmasi dan pangan olahan, peningkatan level maturitas industri farmasi, serta pemberdayaan fasilitator UMKM.
 - c. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk mewujudkan konsumen cerdas yang mampu melindungi diri, keluarga, dan komunitas dari produk yang tidak memenuhi syarat.
4. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan terhadap usulan tambahan Anggaran Badan POM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp2.605.671.252.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)**.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.32 WIB.

Jakarta, 3 September 2025

KEPALA BADAN POM RI,

KETUA RAPAT,

TTD

TTD

dr. TARUNA IKRAR, M.Biomed., MD., Ph.D.

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
A-42